

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. (Desiana wati, dkk, 2014)

Tuntutan masyarakat kepada pemerintahan adalah dihasilkannya laporan keuangan yang telah memenuhi keempat karakteristik kualitas laporan keuangan tersebut. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya terhadap publik. Pemerintah daerah berupaya menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Pramudiarta, 2015).

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah

dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal (Pramudiarta, 2015). Laporan keuangan yang ideal adalah laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif dan juga bisa dipertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik, karena laporan keuangan yang dihasilkan nantinya akan dimanfaatkan bagi seluruh entitas sebagai pedoman dalam membuat kebijakan-kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Riandani, 2017)

Karakteristik kualitatif merupakan ukuran-ukuran normatif sebuah laporan keuangan yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan yang dihasilkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah (PP No.71 tahun 2010) karakteristik laporan keuangan antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Jika informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif, berarti pemerintah daerah telah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan yang saat ini berbasis akrual terdiri dari :

1. Laporan realisasi anggaran
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
3. Laporan operasional
4. Laporan perubahan ekuitas
5. Neraca
6. Laporan arus kas
7. Catatan atas laporan keuangan.

UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara khususnya pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Riandani, 2017)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Opini yang diberikan atas suatu LKPD merupakan cermin bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD. Adanya perubahan

peningkatan opini laporan keuangan suatu pemerintah daerah, misalnya dari WDP ke WTP secara umum telah menggambarkan adanya perbaikan akuntabilitas keuangan oleh pemerintahan daerah tersebut dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip yang berlaku (Septiana, 2017).

Pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai dan memahami tentang ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah sedangkan menurut (Desiana, 2014) Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten. Hal ini senada dengan penelitian (Ihsanti, 2014) bahwa laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Dengan kata lain, unsur pemahaman akuntansi berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Nasrudin (2008), sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Rafid, 2016). Menurut Spencer and Spencer (1993) kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau

karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu (*A competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion referenced effective and or superior performance in a job or situation*).

Kemampuan sumber daya manusia adalah kapasitas seseorang atau individu, suatu organisasi/kelembagaan, atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi akan menentukan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah setiap sumber daya manusianya harus memiliki pemahaman yang baik tentang pekerjaannya seperti pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan yang menjadi prinsip dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Rafid, 2016).

Oleh karena itu kompetensi SDM merupakan salah satu faktor utama demi terwujudnya output yang berkualitas, dalam hal ini laporan keuangan pemerintah daerah. Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka perlu diperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, seperti pemahaman akan SAP. Menurut Tuasikal (2007) Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka, laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem

akuntansi. Pemahaman terhadap SAP ini diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan).

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 pada bagian pengantar standar akuntansi pemerintah, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyajian dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Namun pada kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang belum menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP agar hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Selain pemahaman terhadap SAP, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) juga sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Halim (2007) menyatakan bahwa untuk dapat menyediakan informasi secara tepat dan akurat komponen yang dibutuhkan adalah suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi. Untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai SAP harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula. Komponen yang sangat perlu untuk dikenali dan dipahami untuk mendukung kualitas laporan keuangan daerah meliputi faktor-faktor seperti kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi antara lain perangkat keras dan perangkat lunak (Halim, 2004).

Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 pasal 1 ayat 5). Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang baik akan menghasilkan penatausahaan keuangan daerah yang memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi sehingga pengelolaan laporan keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif (Halim, 2014). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ditempatkan dalam upaya mencapai komputerisasi dalam organisasi pemerintah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (Entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang andal dan kurang relevan untuk membuat keputusan (Mardiasmo, 2004).

Faktor lain yang juga ikut mempengaruhi baik buruknya kualitas laporan keuangan adalah dukungan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Jogiyanto (1995) teknologi merupakan alat yang digunakan individual dalam penyelesaian tugas mereka, dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak, data) dan penggunaan jasa pendukung (*training*) yang memberikan panduan penggunaan

dalam menyelesaikan tugas.

Dukungan penggunaan teknologi informasi ini juga membantu mempercepat proses penyampaian dan pemahaman informasi, khususnya dalam mengantisipasi intensitas perubahan-perubahan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang sering terjadi. Meskipun adanya perubahan laporan keuangan yang sebelumnya *Cash Basis* menjadi *akrual basis*. Pemerintah seharusnya menjadikan ini sebagai tantangan agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri (Riandani, 2017).

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan data-data transaksi yang dari tahun ke tahun semakin besar serta kualitas data yang kian semakin kompleks dan rumit dikarenakan semakin meningkatnya total volume APBN/D dari tahun ke tahun. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar, semakin kompleks dan rumit. Dengan tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu.

Penelitian ini mengkombinasikan variabel-variabel bebas penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rafid (2016), Desiana Wati (2014), Rahmawati, dkk (2018) dan Artika (2016). Motivasi untuk melakukan

penelitian ini adalah Pertama, ingin menguji seberapa besar pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kedua, ingin menguji sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan dengan baik dan jujur serta dilihat sejauh mana pemahaman SAP, Penerapan SAKD dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang dimiliki oleh para staff *Accounting* di pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah agar dapat dikatakan berkualitas.

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini diantaranya yaitu penelitian Rafid (2016) yang melakukan penelitian pada Pemerintahan Kabupaten Bone menunjukkan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pemerintahan Kabupaten Bone. Penelitian Sari (2014) yang melakukan penelitian pada Dinas-Dinas Kabupaten Jember juga menunjukkan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah penelitian Artika (2016) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian Pujanira (2017) yang meneliti pada Pemerintah Daerah

Provinsi DIY juga menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah penelitian Artika (2016) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, penelitian ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian Rahmawati, dkk (2018) yang meneliti pada SKPD Kota Tangerang Selatan juga menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK perwakilan Provinsi Jawa Tengah dapat diketahui bahwa hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purbalingga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya pada tahun 2016. Sedangkan sebelumnya, pada tahun 2012-2015 hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Purbalingga meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (semarang.bpk.go.id)

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dan untuk mengetahui sejauh mana kualitas informasi yang

dihasilkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
2. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan memoderasi hubungan antara Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Kualitas Laporan Keuangan?
5. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan?
6. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan memoderasi hubungan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris kompetensi sumber daya manusia memoderasi pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris kompetensi sumber daya manusia memoderasi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
6. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris kompetensi sumber daya manusia memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Bagi pemerintah daerah, dapat dijadikan sebagai dasar dan acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya kepada pihak yang menyusun laporan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas baik.
2. Bagi akademik, dapat memberikan kontribusi pengembangan literatur Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, dan menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.

